

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah dinamika kudeta Myanmar dapat dipahami melalui kerangka *complex interdependence*, yang menunjukkan bahwa kerja sama tetap berlangsung meskipun dihadapi oleh ketidakstabilan politik domestik salah satu negara anggota. Dalam kerangka ini, hubungan antarnegara ditopang oleh adanya *multiple channels*, tidak adanya hierarki isu yang kaku (*absence of hierarchy of issues*), serta berkurangnya kekuatan militer (*minor role of military force*) dalam hubungan antarnegara. Melalui karakteristik tersebut, ASEAN Connectivity tetap berlanjut melalui tiga pilar utama, yaitu *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity*.

Pada pilar *physical connectivity*, kudeta Myanmar menyebabkan keterlambatan dan penundaan beberapa proyek infrastruktur, seperti ASEAN Highway Network (AHN), IMT-TH, dan Dawei Special Economic Zone, serta menurunkan kepercayaan dari lembaga donor internasional seperti JICA dan ADB, meskipun tidak sepenuhnya menghentikan pendanaan. Dalam menjaga kelangsungan program pembangunan, *complex interdependence* dalam karakteristik *multiple channels*, menyediakan beragam saluran melalui negara, lembaga pembangunan, dan aktor nonnegara dengan berbagai strategi adaptif, yaitu koridor alternatif seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan pengembangan koridor maritim RoRo Indonesia-Malaysia yang menunjukkan bahwa

keberlanjutan konektivitas tetap dapat berjalan melalui diversifikasi jalur kerja sama.

Pada pilar *institutional connectivity*, kudeta Myanmar berdampak pada absennya kepala negara dalam forum-forum ASEAN, yang digantikan oleh pejabat level teknis. Meskipun demikian, melalui mekanisme adaptif dalam kerangka *complex interdependence*, interaksi kawasan tidak hanya bergantung pada pemimpin negara, namun juga berlangsung karena adanya *multiple channels* yang memungkinkan kementerian, lembaga teknis, dan forum sektoral dapat melanjutkan agenda pembangunan. Agenda pembangunan tetap berlanjut dengan terus mendorong ASEAN Connectivity Strategic Plan (ACSP) 2026-2035, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), serta respon dinamika politik melalui jalur diplomatik Five-Point Consensus, yang mencerminkan bahwa tidak adanya dominasi isu.

Pada pilar *people-to-people connectivity*, dinamika politik Myanmar berdampak pada mobilitas tenaga kerja, pendidikan serta pariwisata, termasuk keterbatasan implementasi Mutual Recognition Arrangements (MRAs), serta penutupan beberapa pos perbatasan seperti Myawaddy-Mae Sot dan Thai-Myanmar Friendship Bridge. Namun, interaksi masyarakat tetap dapat berlangsung melalui berbagai saluran (*multiple channels*) lewat restrukturisasi program oleh ILO, dukungan Indonesia dan negara lainnya dalam mendorong penguatan MRAs, dan kunjungan ke universitas di Myanmar. Kondisi ini juga mencerminkan pendekatan militer tidak lagi digunakan sebagai strategi adaptif dalam pembangunan kawasan.

4.2 Saran

Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah kudeta Myanmar 2021 dengan pendekatan *complex interdependence*. Hasil dari penelitian ini berfokus pada bagaimana keberlanjutan program pembangunan berjalan ditengah ketidakstabilan politik domestik. ASEAN dan negara anggota lainnya merespon dinamika politik Myanmar melalui jalur alternatif, diplomasi dan penguatan institusi regional, sehingga meskipun kudeta Myanmar berdampak pada pendanaan, agenda pembangunan tetap dapat berjalan melalui mekanisme resiliensi.

ASEAN dan negara anggota lainnya memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian Five-Point Consensus melalui jalur diplomatik yang lebih intensif, sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan kawasan tetap berjalan melalui penguatan kerja sama sub-kawasan seperti IMT-GT dan BIMP-EAGA. ASEAN sebagai organisasi regional perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi MPAC 2025 dan mendorong penguatan pelaksanaan ACSP 2026-2035.

Dalam penelitian selanjutnya perlu adanya analisa lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme adaptasi ASEAN dan negara anggota lainnya dalam menjaga keberlanjutan ASEAN Connectivity di tengah ketidakstabilan politik domestik. Agenda kerja sama pembangunan internasional merupakan langkah kawasan untuk dapat mendorong peningkatan konektivitas, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.